



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 300/SEK/HM.02.3/05/2018
Lampiran : 1 (satu) bundel Data Satuan Kerja
Yang Belum Mengisi Aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP).
Hal : Batas Akhir Pengisian Aplikasi Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP).

Jakarta, 24 Mei 2018

Kepada Yth:
Para Kuasa Pengguna Anggaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
di -

Tempat

Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1010/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Sehubungan dengan hal tersebut agar para Kuasa Pengguna Anggaran yang belum mengupdate Data KPA dan mengisi Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018 ke Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang sudah disediakan oleh LKPP pada <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/>, diharapkan untuk segera mengisi Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018 selambat-lambatnya hari kamis tanggal 31 Mei 2018.

Penginputan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tidak hanya terikat pada Satker yang memiliki pengadaan barang/jasa melainkan keseluruhan anggaran DIPA pada Satker (RKAKL), bagi satker Eselon I dan daerah yang tidak menginput Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), maka **remunerasi pada bulan Juni** akan ditunda pembayarannya.

Bagi Satker yang belum mengupdate Data KPA untuk User Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dapat menghubungi :

| No | Nama | Email | No. Hp |
|----|------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Amanda Abidin | | 0812 9594 9282 |
| 2 | Nesya Noritasari | helpdesk-lpse@mahkamahagung.go.id | 0856 2430 6243 |
| 3 | Al Iqbal Lubis | | 0838 9913 9601 |

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial MA RI;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tun MA RI;
7. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI;
8. Kepala Badan Pengawasan MA RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
10. Plt. Kepala Biro Perlengkapan MA RI;
11. Kepala Biro Keuangan MA RI;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI;
13. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan;
14. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan.

Satuan Kerja Yang Belum Mengisi Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) :

1. MAHKAMAH SYARIYAH BANDA ACEH
2. MAHKAMAH SYARIYAH CALANG
3. MAHKAMAH SYARIYAH LHOK SEUMAWE
4. MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG
5. PENGADILAN AGAMA BAJAWA
6. PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
7. PENGADILAN AGAMA BARABAI
8. PENGADILAN AGAMA BAWEAN
9. PENGADILAN AGAMA BIMA
10. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI
11. PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU
12. PENGADILAN AGAMA KOLAKA
13. PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
14. PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
15. PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN
16. PENGADILAN AGAMA LAHAT
17. PENGADILAN AGAMA MADIUN
18. PENGADILAN AGAMA MAGETAN
19. PENGADILAN AGAMA MALANG
20. PENGADILAN AGAMA MARISA
21. PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
22. PENGADILAN AGAMA MASOHI
23. PENGADILAN AGAMA MATARAM
24. PENGADILAN AGAMA MEDAN
25. PENGADILAN AGAMA NGAWI
26. PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
27. PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
28. PENGADILAN AGAMA SELONG
29. PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
30. PENGADILAN AGAMA SUMENEP
31. PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI
32. PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
33. PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI
34. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
35. PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG
36. PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN
37. PENGADILAN MILITER II - 09 DI BANDUNG
38. PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA
39. PENGADILAN MILITER III - 15 DI KUPANG
40. PENGADILAN MILITER III - 19 DI JAYAPURA
41. PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
42. PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
43. PENGADILAN NEGERI BANDUNG
44. PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
45. PENGADILAN NEGERI BANTA ENG
46. PENGADILAN NEGERI BARRU
47. PENGADILAN NEGERI BEKASI
48. PENGADILAN NEGERI BIREUEN
49. PENGADILAN NEGERI BOGOR
50. PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
51. PENGADILAN NEGERI BUOL
52. PENGADILAN NEGERI CALANG
53. PENGADILAN NEGERI CIBADAK
54. PENGADILAN NEGERI CIREBON
55. PENGADILAN NEGERI DEPOK
56. PENGADILAN NEGERI ENREKANG
57. PENGADILAN NEGERI GARUT
58. PENGADILAN NEGERI GRESIK
59. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
60. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
61. PENGADILAN NEGERI KOLAKA
62. PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO
63. PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS

64. PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
65. PENGADILAN NEGERI KUPANG
66. PENGADILAN NEGERI LEMBATA
67. PENGADILAN NEGERI MAMUJU
68. PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
69. PENGADILAN NEGERI MARISA
70. PENGADILAN NEGERI MASOHI
71. PENGADILAN NEGERI MATARAM
72. PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
73. PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE
74. PENGADILAN NEGERI NABIRE
75. PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
76. PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
77. PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
78. PENGADILAN NEGERI POLEWALI
79. PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
80. PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
81. PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA
82. PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
83. PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
84. PENGADILAN NEGERI SEKAYU
85. PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
86. PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
87. PENGADILAN NEGERI SIGLI
88. PENGADILAN NEGERI SINJAI
89. PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
90. PENGADILAN NEGERI SO'E
91. PENGADILAN NEGERI SORONG
92. PENGADILAN NEGERI SUBANG
93. PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
94. PENGADILAN NEGERI SUMENEP
95. PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
96. PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
97. PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG
98. PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI
99. PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP
100. PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
101. PENGADILAN NEGERI WAMENA
102. PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG
103. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
104. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
105. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
106. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
107. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG
108. PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
109. PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
110. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
111. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
112. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN